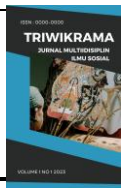
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



KETELADANAN BAHASA DAN AKUNTABILITAS KOMUNIKASI PEMIMPIN: KAJIAN SOSIOPRAGMATIK ATAS ETIKA KOMUNIKASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

[1]Mohamad Arief Rifai, [2]Riswanda

[1,2] Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

aierifai22@gmail.com,
riswanda@untirta.ac.id

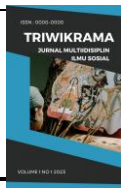
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Etika berbahasa pemimpin merupakan dimensi penting dalam komunikasi publik karena tuturan pejabat tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga merepresentasikan relasi kekuasaan dan dapat menjadi rujukan sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji keteladanan bahasa pemimpin melalui perspektif sosiopragmatik serta merumuskan prinsip komunikasi publik yang etis dan akuntabel di era digital. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dan pembacaan kritis terhadap contoh tuturan publik yang terdokumentasi dalam literatur dan sumber pemberitaan. Analisis memadukan prinsip kesantunan pragmatik, teori belajar sosial, karakter komunikasi digital, dan akuntabilitas komunikasi publik. Sintesis konseptual menunjukkan bahwa tuturan pemimpin dapat dimaknai secara beragam setelah beredar di ruang digital, antara lain sebagai penerimaan, kritik, satire, atau reproduksi. Amplifikasi pesan tidak dapat langsung dipersamakan dengan legitimasi sosial, peniruan perilaku, maupun perubahan norma komunikasi. Etika komunikasi pemimpin perlu melampaui kesantunan verbal dengan mencakup ketepatan informasi, argumentasi berbasis bukti, penghormatan terhadap kritik, empati, keterbukaan terhadap koreksi, dan pertanggungjawaban publik. Artikel mengusulkan pedoman komunikasi kepemimpinan melalui pemeriksaan konteks dan fakta, pengendalian diri berbahasa, mekanisme klarifikasi dan koreksi, serta evaluasi komunikasi. Penelitian empiris lanjutan diperlukan untuk menguji hubungan antara tuturan pemimpin dan perubahan persepsi maupun perilaku komunikasi masyarakat.

Kata Kunci: Etika Berbahasa; Komunikasi Pemimpin; Sosiopragmatik; Keteladanan Sosial; Akuntabilitas Komunikasi Publik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



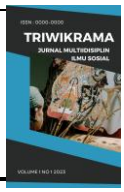
ABSTRACT

Leaders' language ethics are an important dimension of public communication because public officials' utterances convey messages while also representing power relations and potentially serving as social references. This article examines leaders' linguistic role modeling from a sociopragmatic perspective and formulates principles for ethical and accountable public communication in the digital age. It adopts a qualitative literature-based approach and critically examines documented examples of public utterances discussed in scholarly literature and news sources. The analysis combines pragmatic politeness, social learning theory, digital communication, and public communication accountability. The conceptual synthesis indicates that leaders' utterances may be interpreted in different ways after digital circulation, including acceptance, criticism, satire, or reproduction. Message amplification does not in itself demonstrate social legitimacy, behavioral imitation, or changes in communication norms. Ethical leadership communication should go beyond verbal politeness to include information accuracy, evidence-based argumentation, respect for criticism, empathy, openness to correction, and public accountability. The article proposes communication guidelines emphasizing contextual and factual review, linguistic self-restraint, clarification and correction mechanisms, and communication evaluation. Further empirical research is required to examine the relationship between leaders' utterances and changes in public perceptions and communication behavior.

***Keywords**: Language Ethics; Leadership Communication; Sociopragmatics; Social Modeling; Public Communication Accountability.*

LATAR BELAKANG

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi, tetapi juga mencerminkan nilai etika, budaya, dan identitas sosial. Dalam kehidupan sosial maupun akademik, penggunaan bahasa yang santun dapat membantu membangun hubungan, mencegah konflik, dan menjaga penghormatan antarpihak. Namun, perkembangan teknologi digital dan media sosial mengubah pola komunikasi masyarakat, khususnya generasi muda. Interaksi yang cepat dan sering kali minim konteks dapat mendorong penggunaan bahasa yang lebih spontan, termasuk ujaran kasar dan ekspresi emosional. Kondisi tersebut perlu dipahami secara hati-hati



karena perubahan gaya berbahasa tidak selalu menunjukkan penurunan etika; penilaiannya perlu mempertimbangkan konteks, tujuan, hubungan antarpenutur, dan norma yang berlaku.

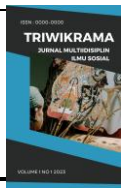
Sejumlah kajian mengenai kesantunan dan etika berbahasa generasi muda digunakan dalam artikel ini untuk menunjukkan pentingnya persoalan tersebut. Fatmawati dan Ningsih (2026), misalnya, dilaporkan mengkaji 699 siswa SMA dan membahas pemahaman siswa mengenai fungsi bahasa santun serta praktik berbahasa di ruang digital. Deso et al. (2026) juga dibahas sebagai kajian mengenai hubungan antara pengetahuan kebahasaan dan praktik berbahasa mahasiswa. Temuan kedua penelitian tersebut perlu dibaca sesuai ruang lingkup dan metode masing-masing; temuan pada kelompok tertentu tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan seluruh generasi muda Indonesia.

Dalam konteks tersebut, pemimpin baik pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun pimpinan lembaga memiliki posisi penting sebagai teladan komunikasi. Pemimpin tidak hanya dinilai melalui kebijakan yang diambil, tetapi juga melalui cara menyampaikan gagasan, menjawab pertanyaan, dan merespons kritik. Tuturan pemimpin memperoleh perhatian karena disampaikan dari posisi otoritas dan kerap disebarluaskan melalui media massa maupun media sosial. Oleh sebab itu, pilihan kata dan cara berkomunikasi pemimpin layak dikaji sebagai bagian dari etika komunikasi publik.

Perdebatan mengenai etika berbahasa pemimpin antara lain muncul ketika tuturan pejabat menggunakan diksi informal, ungkapan kasar, atau respons yang dinilai merendahkan pihak lain. Salah satu contoh yang pernah menjadi perhatian pemberitaan adalah penggunaan frasa “ndasmu etik” dalam konteks komunikasi politik. Contoh tersebut dalam artikel ini diperlakukan sebagai bahan pembacaan wacana, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan karakter pribadi penutur atau sikap seluruh masyarakat. Secara sosiopragmatik, penilaian terhadap tuturan perlu mempertimbangkan konteks, sasaran, tujuan, relasi kekuasaan, serta respons yang muncul.

Selain pilihan kata, persoalan etika komunikasi publik juga berkaitan dengan kemampuan pejabat dalam mengakui dan merespons pengalaman masyarakat. Pernyataan yang dianggap mengabaikan keresahan publik atau menyindir pihak yang menyampaikan kritik dapat memicu perdebatan mengenai empati dan penghormatan dalam komunikasi. Meskipun demikian, dampak suatu tuturan terhadap norma masyarakat tidak dapat diasumsikan secara langsung. Dampak tersebut perlu dibedakan dari respons sesaat, viralitas, maupun penilaian media sosial.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Secara sosiopragmatik, tuturan pemimpin berkaitan dengan relasi kekuasaan (*power relations*) dan jarak sosial (*social distance*). Posisi otoritas membuat tuturan pemimpin memiliki jangkauan dan bobot simbolik yang dapat berbeda dari percakapan antarindividu. Di era digital, pernyataan publik dapat direkam, dikutip, disebarkan, dan ditafsirkan ulang di luar konteks awalnya. Karena itu, keteladanan bahasa (*linguistic role modeling*) penting dibahas sebagai salah satu kemungkinan mekanisme pembelajaran norma komunikasi, tanpa menganggap bahwa setiap tuturan otomatis ditiru oleh masyarakat.

Kajian kesantunan berbahasa selama ini memberikan perhatian pada norma pragmatik, konteks sosial, dan praktik komunikasi dalam berbagai lingkungan. Namun, hubungan antara otoritas simbolik pemimpin, penilaian etis atas tuturan publik, serta kemungkinan reproduksi atau penolakan pesan di ekosistem digital masih memerlukan pembacaan yang terintegrasi. Artikel ini menawarkan kerangka analitis yang mempertemukan sosiopragmatik, keteladanan sosial, dan akuntabilitas komunikasi publik. Kebaruan tersebut ditempatkan sebagai tawaran konseptual yang masih perlu diuji melalui penelusuran literatur yang lebih sistematis, bukan sebagai klaim bahwa belum pernah ada penelitian sejenis. Fokus kajian bukan membuktikan hubungan sebab-akibat antara tuturan pemimpin dan perilaku masyarakat, melainkan menyusun penjelasan konseptual berdasarkan literatur dan contoh tuturan yang terdokumentasi.

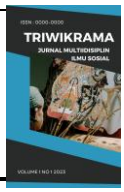
RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk dan strategi kesantunan atau ketidaksantunan dalam tuturan publik pemimpin diidentifikasi melalui pendekatan sosiopragmatik?
2. Bagaimana keteladanan sosial dan amplifikasi digital secara teoretis menjelaskan kemungkinan penerimaan, penolakan, atau reproduksi tuturan pemimpin?
3. Bagaimana prinsip etika komunikasi publik dapat dirumuskan menjadi pedoman kepemimpinan yang tegas, empatik, dan akuntabel?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis bentuk dan strategi kesantunan atau ketidaksantunan dalam tuturan publik pemimpin melalui pendekatan sosiopragmatik.
2. Menjelaskan secara konseptual kemungkinan hubungan keteladanan sosial dan amplifikasi digital dengan pemaknaan serta reproduksi tuturan pemimpin.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



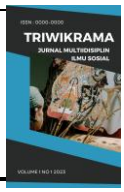
3. Merumuskan prinsip komunikasi publik yang tegas, empatik, transparan, dan akuntabel bagi pemimpin serta tim komunikasinya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan pembacaan kritis terhadap contoh tuturan publik yang telah terdokumentasi. Bahan kajian mencakup literatur tentang pragmatik dan kesantunan berbahasa, teori belajar sosial, komunikasi publik di era digital, akuntabilitas pemerintahan, serta sumber dokumenter dan pemberitaan yang memuat contoh tuturan pejabat. Pemilihan bahan dilakukan berdasarkan relevansi langsung dengan tiga fokus kajian, yaitu (1) bentuk kesantunan atau ketidaksantunan dalam tuturan pemimpin; (2) kemungkinan pemaknaan dan reproduksi tuturan dalam ekosistem digital; dan (3) prinsip akuntabilitas komunikasi publik. Artikel ini tidak menghimpun korpus tuturan primer secara sistematis, tidak menetapkan jumlah keseluruhan dokumen sebagai populasi data, dan tidak melakukan pengumpulan data respons khalayak. Oleh karena itu, contoh tuturan diperlakukan sebagai ilustrasi analitis berdasarkan sumber yang dirujuk, bukan sebagai sampel representatif atau bukti perubahan perilaku masyarakat. Setiap kutipan yang dipertahankan dalam naskah perlu diverifikasi kembali melalui rekaman atau transkrip asli, tanggal, konteks, penutur, dan sasaran tuturan sebelum publikasi.

a. Analisis sosiopragmatik digunakan untuk membaca pilihan kata, bentuk tindak tutur (speech acts), strategi kesantunan dan ketidaksantunan (politeness/impoliteness), tujuan komunikasi, konteks peristiwa, relasi kekuasaan, serta posisi penutur dan pihak yang menjadi sasaran tuturan. Pembacaan dilakukan dengan membedakan ketegasan yang berorientasi pada substansi persoalan dari tuturan yang menyerang atau merendahkan pihak lain.
b. Analisis tematik dilakukan melalui tahapan: (1) mengidentifikasi bahan pustaka dan contoh tuturan yang relevan; (2) mengelompokkan informasi ke dalam kategori pilihan kata, tindak tutur, konteks dan relasi kekuasaan, respons atau pemaknaan digital, serta prinsip akuntabilitas; (3) membandingkan kategori tersebut dengan konsep kesantunan, ketidaksantunan, dan keteladanan sosial; dan (4) menyusun sintesis konseptual serta rekomendasi. Data literatur, sumber berita, dan interpretasi penulis dibedakan dalam pembahasan. Karena tidak tersedia korpus tuturan primer yang terverifikasi dan data

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



langsung mengenai respons khalayak, kajian ini tidak menyimpulkan adanya hubungan kausal, desensitisasi moral, atau perubahan norma sosial yang telah terbukti.

PEMBAHASAN

1. Keteladanan Bahasa Pemimpin dan Dinamika Norma Kesantunan Masyarakat di Era Digital

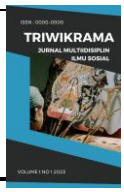
Dalam kerangka sosiopragmatik, tuturan pemimpin perlu dibaca dengan mempertimbangkan pilihan kata, tujuan komunikasi, konteks peristiwa, relasi kekuasaan, dan posisi pihak yang menjadi sasaran. Pemimpin merupakan penutur yang memiliki otoritas dan visibilitas publik sehingga tuturannya berpotensi memperoleh perhatian lebih luas dibandingkan percakapan antarindividu. Posisi tersebut menjadikan komunikasi pemimpin relevan untuk dikaji sebagai praktik bahasa sekaligus bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan.

Pemimpin dapat berfungsi sebagai salah satu referensi atau model komunikasi karena masyarakat dapat mengamati cara pemimpin menyampaikan pendapat, memberikan kritik, menjawab pertanyaan, dan merespons perbedaan pandangan. Dalam perspektif teori belajar sosial Bandura (1977), pengamatan terhadap figur yang dianggap memiliki status atau pengaruh dapat menjadi salah satu jalur pembelajaran perilaku. Namun, teori tersebut tidak berarti bahwa setiap perilaku yang diamati akan diterima atau ditiru. Proses penerimaan dipengaruhi penilaian individu, konteks sosial, identifikasi terhadap figur, serta konsekuensi yang dipersepsikan.

Dengan demikian, bahasa pemimpin dapat menjadi referensi sosial, tetapi proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Tuturan yang santun dapat dipandang sebagai contoh komunikasi yang menghargai perbedaan, sedangkan tuturan yang dianggap kasar atau merendahkan dapat memunculkan kritik, satire, penolakan, maupun kemungkinan reproduksi. Untuk menyatakan bahwa suatu tuturan benar-benar mengubah norma atau perilaku masyarakat, diperlukan data respons khalayak dan prosedur pengujian empiris yang tidak dilakukan dalam artikel ini.

a. Validasi Sosial, Keteladanan, dan Kemungkinan Reproduksi Tuturan

Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory) yang dikemukakan Bandura (1977) menjelaskan bahwa individu dapat mempelajari perilaku melalui pengamatan terhadap orang lain. Dalam konteks komunikasi publik, pemimpin dapat menjadi salah satu figur



yang diamati karena kedudukan dan visibilitasnya. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan kemungkinan keteladanan bahasa, bukan untuk menyimpulkan bahwa masyarakat pasti mengadopsi setiap bentuk tuturan pemimpin.

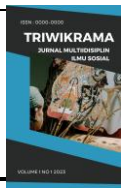
Contoh frasa “ndasmu etik” yang disebut dalam pemberitaan dapat dibaca sebagai bahan analisis sosiopragmatik sepanjang konteks, penutur, sasaran, waktu, dan rekaman atau transkrip aslinya dapat dipastikan. Penilaian terhadap ungkapan tersebut tidak cukup dilakukan dengan mengisolasi kata, tetapi perlu mempertimbangkan konteks peristiwa, tujuan tuturan, relasi penutur dan mitra tutur, serta respons yang dapat diverifikasi. Artikel ini tidak menyatukan contoh tersebut dengan tuturan lain yang berasal dari peristiwa berbeda.

Otoritas pemimpin dapat membuat suatu tuturan memperoleh perhatian dan sirkulasi yang lebih luas. Dalam pengertian konseptual, kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya validasi sosial, yakni ketika perilaku yang ditampilkan figur berstatus tinggi dipersepsikan sebagian khalayak sebagai perilaku yang dapat diterima. Akan tetapi, validasi sosial tidak dapat disimpulkan hanya dari viralitas atau banyaknya tayangan. Bukti penerimaan memerlukan analisis terhadap respons khalayak, misalnya komentar, wawancara, survei, atau bentuk data lain yang dikumpulkan secara sistematis.

Khalayak memiliki posisi aktif dalam menafsirkan tuturan pemimpin. Satu ungkapan dapat diterima oleh sebagian orang, dikritik oleh kelompok lain, digunakan sebagai satire, atau ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan norma komunikasi. Oleh sebab itu, penyebaran tuturan tidak boleh disamakan dengan persetujuan publik. Perbedaan interpretasi tersebut perlu menjadi bagian dari analisis, bukan dianggap sebagai gangguan terhadap kesimpulan awal.

Pembedaan antara ketegasan (assertiveness) dan ketidaksantunan (impoliteness) juga perlu diperjelas. Ketegasan berkaitan dengan kejelasan sikap dan argumentasi, sedangkan ketidaksantunan dapat muncul ketika tuturan mengancam muka, mempermalukan, atau merendahkan pihak lain. Suatu kritik yang keras tidak otomatis tidak etis apabila diarahkan pada substansi, didukung bukti, dan tetap menghormati martabat manusia. Sebaliknya, bahasa yang terdengar halus belum tentu akuntabel apabila menyembunyikan informasi atau menghindari substansi persoalan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Media sosial memungkinkan masyarakat mengutip, mengomentari, dan menggunakan kembali ungkapan pemimpin. Dalam proses tersebut, tuturan dapat dipisahkan dari konteks awal dan memperoleh fungsi baru, misalnya sebagai kritik, humor, satire, dukungan, atau penolakan. Tanpa analisis isi dan konteks terhadap respons digital, reproduksi ungkapan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap pesan atau perilaku penutur.

Secara konseptual, kemungkinan reproduksi tuturan dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan: paparan terhadap pesan, perhatian pada figur atau peristiwa, interpretasi khalayak, dan penggunaan ulang dalam konteks lain. Tahapan ini merupakan kerangka penjelas yang perlu diuji, bukan temuan empiris artikel ini. Penggunaan ulang dapat memiliki makna yang berbeda-beda sehingga tidak cukup dijadikan indikator tunggal perubahan batas kesantunan.

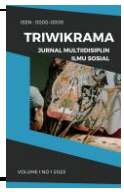
Relasi kekuasaan tetap menjadi aspek penting dalam pembacaan tersebut. Pemimpin memiliki akses terhadap saluran komunikasi dan perhatian publik yang tidak selalu dimiliki warga biasa. Karena itu, tanggung jawab etik pemimpin juga lebih besar: komunikasi perlu disampaikan secara akurat, tidak merendahkan warga, dan terbuka terhadap pertanyaan maupun koreksi.

Etika berbahasa pemimpin dengan demikian berkaitan dengan tanggung jawab atas isi dan cara penyampaian pesan. Keteladanan yang dapat ditawarkan bukan sekadar penggunaan kata-kata halus, melainkan kemampuan menyampaikan sikap secara tegas, argumentatif, dan menghormati pihak lain. Penilaian atas praktik tersebut harus memperhatikan konteks dan bukti tuturan yang dapat diverifikasi.

b. Transmisi dan Amplifikasi Tuturan dalam Ekosistem Digital

Perkembangan teknologi digital memungkinkan pernyataan pemimpin direkam, dibagikan, dikomentari, dan diproduksi ulang dalam waktu singkat. Sirkulasi tersebut memperluas jangkauan pesan sekaligus membuka kemungkinan pemotongan konteks dan perubahan makna. Namun, tingginya eksposur hanya menunjukkan bahwa pesan beredar; hal itu belum membuktikan penerimaan, peniruan, atau perubahan kepekaan moral khalayak.

Penelitian Fatmawati dan Ningsih (2026) yang dalam naskah sumber disebut melibatkan 699 siswa SMA dapat digunakan sebagai konteks mengenai pembahasan kesantunan berbahasa pada kelompok pelajar. Namun, rincian metode, instrumen,



karakteristik responden, dan temuan penelitian tersebut harus diperiksa dari publikasi aslinya sebelum angka maupun kesimpulannya digunakan. Temuan dari kelompok dan lokasi tertentu juga tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh generasi muda.

Kajian mengenai praktik berbahasa generasi muda dapat membantu menjelaskan bahwa pengetahuan tentang norma bahasa dan penerapannya dalam situasi sehari-hari merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun demikian, hubungan antara praktik tersebut dan tuturan pemimpin tidak dapat ditetapkan tanpa data yang secara langsung menghubungkan paparan pesan dengan respons atau perilaku khalayak.

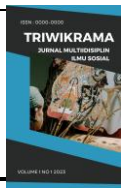
Jejak digital memungkinkan suatu pernyataan dipotong dari rekaman yang lebih panjang, diberi judul, diberi komentar, atau disebarkan kembali dalam konteks berbeda. Karena itu, analisis terhadap tuturan publik perlu merujuk pada sumber primer dan konteks asli sejauh tersedia. Pemberitaan media dapat membantu menelusuri peristiwa, tetapi tetap harus dibedakan dari rekaman atau transkrip primer.

Amplifikasi digital dapat meningkatkan familiaritas masyarakat terhadap suatu ungkapan. Familiaritas tersebut tidak identik dengan penerimaan atau persetujuan. Untuk mengetahui bagaimana khalayak memaknai pesan, peneliti perlu menganalisis respons secara sistematis dengan memperhatikan akun, konteks, waktu, bentuk interaksi, dan kemungkinan bahwa komentar tertentu merupakan satire atau kritik.

Konsep desensitisasi moral merujuk pada kemungkinan berkurangnya kepekaan terhadap perilaku yang sebelumnya dinilai tidak pantas. Konsep ini tidak dapat dibuktikan hanya melalui frekuensi penyebaran video atau kemunculan kata tertentu. Pengujiannya membutuhkan indikator perubahan penilaian atau respons individu dari waktu ke waktu, misalnya melalui survei berulang, wawancara mendalam, atau rancangan penelitian lain yang sesuai.

Oleh karena itu, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa ujaran kasar telah menyebabkan penurunan kepekaan masyarakat. Pernyataan mengenai perubahan standar kesantunan harus ditempatkan sebagai kemungkinan teoretis yang dipengaruhi konteks, norma kelompok, tujuan penggunaan bahasa, serta interpretasi khalayak. Humor, informalitas, dan satire juga perlu dibaca berdasarkan fungsi dan situasi komunikasinya.

Karakter media digital, seperti kecepatan distribusi, fitur berbagi, dan rekomendasi konten, dapat memperbesar jangkauan pesan. Namun, mekanisme



platform tidak menentukan satu makna tunggal. Konten yang sama dapat memperoleh respons dukungan, kritik, parodi, atau penolakan. Analisis terhadap dampak komunikasi digital karena itu memerlukan data respons yang terstruktur dan tidak cukup bertumpu pada asumsi tentang viralitas.

Media digital juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik atau menolak tuturan pemimpin. Kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika komunikasi publik dan perlu diperlakukan sebagai respons yang berbeda dari penerimaan. Dengan demikian, amplifikasi tuturan harus dibedakan dari legitimasi sosial.

Generasi muda merupakan salah satu kelompok yang aktif menggunakan media digital, tetapi keragaman pengalaman dan praktik berbahasa mereka perlu diperhatikan. Artikel ini tidak memiliki data langsung yang dapat menjelaskan bagaimana kelompok tersebut menerima atau menolak tuturan tertentu. Oleh sebab itu, pembahasan generasi muda ditempatkan sebagai konteks konseptual, bukan sebagai kesimpulan empiris.

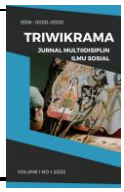
Jejak digital dapat menjadi arsip sekaligus ruang negosiasi makna. Reproduksi suatu ungkapan dapat menunjukkan bahwa pesan dikenal atau digunakan kembali, tetapi makna reproduksi tersebut harus ditentukan melalui konteks. Penelitian lanjutan perlu menggabungkan verifikasi sumber tuturan dengan analisis respons khalayak agar hubungan antara keteladanan bahasa dan perilaku komunikasi dapat diuji.

c. Negosiasi Norma Kesantunan Digital dan Konteks Akademik

Perkembangan komunikasi digital turut mengubah cara masyarakat menggunakan dan menilai bahasa. Kesantunan tidak hanya berkaitan dengan bentuk formal, tetapi juga dengan konteks, tujuan, hubungan sosial, dan norma komunitas. Karena itu, perubahan gaya komunikasi tidak serta-merta dapat disebut sebagai kemerosotan etika.

Istilah new politeness dapat digunakan untuk menjelaskan negosiasi norma kesantunan dalam lingkungan digital. Konsep ini perlu didefinisikan secara jelas dan didukung rujukan yang relevan. Pola informal, humor, atau satire dapat diterima dalam konteks tertentu, tetapi belum tentu sesuai untuk komunikasi pemerintahan, forum akademik, atau komunikasi antara pejabat dan warga. Hal yang penting adalah kemampuan memahami batas konteks serta tetap menghormati pihak lain.

Studi Deso et al. (2026) yang disebut dalam naskah sumber perlu diperiksa melalui publikasi aslinya sebelum digunakan untuk menyatakan temuan mengenai etika



berbahasa mahasiswa. Penulis perlu memastikan identitas jurnal, volume, nomor, halaman, metode, dan kesesuaian simpulan dengan isi artikel. Tanpa pemeriksaan tersebut, rujukan hanya dapat diperlakukan sebagai bahan penelusuran, bukan sebagai bukti yang telah tervalidasi.

Tuturan pemimpin yang beredar di media massa atau ruang digital dapat menjadi bahan perdebatan mengenai standar kesantunan. Akan tetapi, tidak tepat menyimpulkan bahwa tuturan tersebut secara langsung membentuk perilaku mahasiswa atau masyarakat. Hubungan semacam itu membutuhkan data tentang paparan, interpretasi, dan respons kelompok yang diteliti.

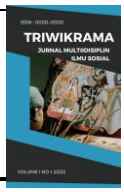
Konteks akademik memiliki norma komunikasi yang menekankan argumentasi, keterbukaan terhadap koreksi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Norma tersebut tidak meniadakan kritik yang tegas. Kritik akademik justru dapat disampaikan secara tajam sepanjang berbasis bukti, relevan dengan substansi, dan tidak menyerang martabat pribadi.

Bahasa berperan dalam menjaga kualitas hubungan akademik karena diskusi yang argumentatif dan saling menghormati memungkinkan perbedaan pandangan dibahas secara produktif. Namun, artikel ini tidak mengukur apakah tuturan pejabat tertentu telah mengubah praktik komunikasi di perguruan tinggi. Hubungan tersebut menjadi agenda penelitian empiris berikutnya.

Respons pejabat yang dinilai mengabaikan keresahan masyarakat dapat memunculkan pertanyaan tentang empati dan akuntabilitas komunikasi. Penilaian tersebut perlu didasarkan pada isi pernyataan secara utuh dan konteks persoalan yang sedang dibahas, bukan semata-mata potongan kutipan atau interpretasi media.

Komunikasi publik yang akuntabel menuntut pejabat tidak hanya menjawab keberadaan kritik, tetapi juga merespons substansi yang disampaikan. Respons yang baik menjelaskan data, alasan kebijakan, langkah tindak lanjut, serta batas kewenangan secara terbuka. Apabila informasi belum tersedia, pejabat perlu menyampaikan keterbatasan tersebut dan menjelaskan kapan atau bagaimana pembaruan akan diberikan.

Istilah cynical escapism dalam naskah perlu didefinisikan dan ditopang sumber teoretis yang jelas apabila tetap dipertahankan. Tanpa definisi operasional dan bukti yang memadai, istilah tersebut sebaiknya tidak digunakan untuk menjelaskan respons



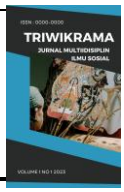
masyarakat secara umum. Artikel ini tidak memiliki data yang cukup untuk menyimpulkan munculnya kecenderungan tersebut.

Mahasiswa dan kelompok muda dapat menjadi subjek penting dalam penelitian lanjutan mengenai penerimaan dan penolakan tuturan pemimpin. Penelitian tersebut perlu menentukan kriteria responden, indikator persepsi, metode pengumpulan data, dan prosedur analisis agar kesimpulan tidak digeneralisasi secara berlebihan.

Perubahan bahasa merupakan bagian dari perkembangan masyarakat dan teknologi. Bahasa informal tidak selalu negatif, sebab kesesuaiannya bergantung pada konteks dan tujuan komunikasi. Literasi digital dan kebahasaan diperlukan agar pengguna mampu menyesuaikan gaya komunikasi tanpa menghilangkan penghormatan terhadap pihak lain.

Berdasarkan pembahasan tersebut, keteladanan bahasa pemimpin dapat dipahami sebagai kemungkinan referensi sosial yang berinteraksi dengan dinamika pemaknaan digital. Penerimaan, penolakan, dan reproduksi tuturan merupakan proses yang berbeda dan tidak dapat disimpulkan hanya dari penyebaran pesan. Karena itu, analisis perlu menghubungkan konteks sosiopragmatik dengan akuntabilitas komunikasi publik.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. Strategi dan Pembiasaan Komunikasi Positif Berbasis Kesantunan Berbahasa bagi Pemimpin sebagai *Role Model*

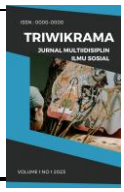
Upaya membangun kembali iklim komunikasi publik yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar aturan mengenai penggunaan bahasa. Pemimpin dan pejabat publik perlu memiliki kesadaran bahwa setiap tuturan yang disampaikan kepada masyarakat dapat memiliki dampak sosial yang lebih luas, terutama dalam era digital. Bahasa yang digunakan oleh pemimpin tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi contoh mengenai bagaimana masyarakat seharusnya berkomunikasi ketika menghadapi perbedaan pendapat, kritik, konflik, maupun persoalan sosial. Oleh karena itu, pembiasaan komunikasi positif perlu ditempatkan sebagai bagian dari etika kepemimpinan dan bukan hanya sebagai persoalan teknis kebahasaan.

Pembiasaan komunikasi positif tidak berarti bahwa seorang pemimpin harus selalu menggunakan bahasa yang lembut atau menghindari kritik. Seorang pemimpin tetap perlu menyampaikan sikap secara tegas, terutama ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Namun, ketegasan tersebut perlu disertai dengan kemampuan mengendalikan pilihan kata, memahami konteks sosial, menghargai pihak lain, dan mempertimbangkan konsekuensi dari tuturan yang disampaikan. Dalam perspektif sosiopragmatik, kesantunan tidak hanya berkaitan dengan benar atau salahnya struktur bahasa, tetapi juga dengan kesesuaian bahasa terhadap situasi, hubungan sosial, tujuan komunikasi, dan posisi penutur maupun mitra tutur.

Dengan demikian, strategi pembiasaan komunikasi positif bagi pemimpin dapat diarahkan pada pembentukan kebiasaan berbahasa yang mampu menggabungkan ketegasan, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap masyarakat. Beberapa strategi tersebut dapat dilakukan melalui penerapan prinsip kesantunan dalam retorika publik, penguatan pengendalian diri dalam komunikasi, serta pembiasaan komunikasi yang empatik dan inklusif.

a. Penerapan Prinsip *Tact* dan *Generosity* dalam Retorika Publik

Dalam teori kesantunan Leech, kesantunan berbahasa berkaitan dengan kemampuan penutur dalam mengurangi kerugian atau beban bagi orang lain serta meningkatkan penghargaan terhadap mitra tutur. Prinsip tersebut relevan dalam komunikasi pemimpin karena seorang pemimpin berhadapan dengan masyarakat yang memiliki latar belakang, kepentingan, dan pandangan yang beragam. Oleh sebab itu,



bahasa yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan maupun merespons kritik perlu mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai mitra komunikasi.

Penerapan *Tact Maxim* atau Maksim Kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kata-kata yang berpotensi mempermalukan, merendahkan, atau menyerang pihak lain. Ketika menghadapi kritik, pemimpin tidak harus selalu menyetujui pendapat yang disampaikan. Pemimpin tetap dapat memberikan sanggahan secara tegas, tetapi sanggahan tersebut sebaiknya diarahkan pada substansi persoalan dan didukung oleh data atau argumentasi yang jelas.

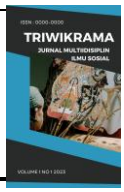
Sementara itu, *Generosity Maxim* atau Maksim Kedermawanan menekankan kesediaan penutur untuk memberikan ruang dan manfaat kepada mitra tutur. Dalam komunikasi kepemimpinan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui kesediaan mendengarkan kritik, menerima masukan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam komunikasi publik.

Penerapan kedua prinsip tersebut dapat mengurangi kecenderungan penggunaan retorika defensif dalam menghadapi kritik. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, respons terhadap kritik sebaiknya tidak diarahkan kepada pribadi kritikus, tetapi kepada isi persoalan yang dikemukakan. Cara tersebut dapat mencegah munculnya *ad hominem* dan mengarahkan komunikasi pada pembahasan yang lebih substantif.

Pemimpin juga perlu membedakan antara ketegasan dengan agresivitas verbal. Ketegasan diperlukan untuk menyampaikan keputusan dan sikap secara jelas, sedangkan agresivitas verbal dapat muncul ketika ketegasan disertai penghinaan, ejekan, atau serangan terhadap pihak lain. Dengan menggunakan bahasa yang tegas tetapi santun, pemimpin dapat menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak harus diselesaikan melalui bahasa yang konfrontatif.

Kebiasaan tersebut sekaligus dapat menjadi bentuk *linguistic role modeling* bagi masyarakat. Ketika pemimpin secara konsisten menggunakan bahasa yang argumentatif dan menghargai pihak yang berbeda pandangan, masyarakat memperoleh contoh bahwa kritik dapat disampaikan tanpa merendahkan. Pola tersebut juga relevan bagi generasi muda yang banyak berinteraksi di media sosial dan lingkungan pendidikan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dengan demikian, penerapan prinsip *Tact* dan *Generosity* dapat menjadi dasar dalam membangun retorika publik yang lebih santun. Pemimpin tetap dapat mempertahankan ketegasan dan kewibawaan, tetapi penyampaiannya dilakukan melalui bahasa yang menghargai masyarakat. Konsistensi dalam menerapkan prinsip tersebut dapat memperkuat keteladanan pemimpin sekaligus mendukung terbentuknya budaya komunikasi yang lebih sehat.

b. Pelembagaan *Linguistic Self-Restraint* dan Manajemen Komunikasi Digital

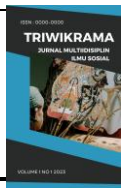
Era digital membuat setiap tuturan pemimpin memiliki jangkauan yang lebih luas dan dapat bertahan dalam waktu yang panjang. Pernyataan yang disampaikan dalam pidato, wawancara, konferensi pers, maupun media sosial dapat direkam dan disebarluaskan kembali dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, pemimpin perlu memiliki *linguistic self-restraint*, yaitu kemampuan mengendalikan pilihan dan penggunaan bahasa sebelum menyampaikan suatu pernyataan kepada publik.

Linguistic self-restraint tidak berarti membatasi kebebasan pemimpin untuk menyampaikan pendapat. Konsep ini lebih berkaitan dengan kemampuan melakukan pertimbangan sebelum berbicara. Pemimpin perlu memikirkan apakah suatu kata atau ungkapan sesuai dengan konteks, bagaimana kemungkinan masyarakat menafsirkannya, serta apakah pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun etika.

Pengendalian diri menjadi semakin penting ketika pemimpin menghadapi kritik atau pertanyaan yang bersifat sensitif. Respons spontan dapat menghasilkan pernyataan yang terlalu emosional dan kemudian menjadi bahan perdebatan di media sosial. Dengan memberikan jeda evaluatif sebelum merespons, pemimpin memiliki kesempatan untuk menyusun jawaban yang lebih terukur tanpa menghilangkan ketegasan terhadap persoalan yang sedang dibahas.

Selain pengendalian diri, manajemen komunikasi digital juga perlu diperkuat melalui peran tim komunikasi dan juru bicara profesional. Tim komunikasi dapat membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki kejelasan, ketepatan konteks, dan tidak mudah menimbulkan interpretasi yang keliru. Pemahaman terhadap aspek sosiopragmatik dapat membantu menentukan bahasa yang sesuai berdasarkan situasi, tujuan komunikasi, dan karakter masyarakat yang menjadi sasaran pesan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Dalam komunikasi digital, pemimpin juga perlu menyadari bahwa suatu pernyataan dapat dipotong dari konteks awalnya. Satu kalimat dapat dijadikan judul berita, potongan video, kutipan, atau konten media sosial. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa yang terlalu ambigu, provokatif, atau mudah disalahartikan perlu dipertimbangkan secara matang. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab komunikasi karena jejak digital sulit dihapus sepenuhnya setelah suatu pernyataan tersebar.

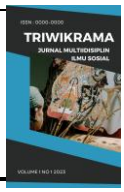
Pelembagaan *linguistic self-restraint* juga dapat dilakukan melalui pedoman komunikasi publik yang memberikan arahan mengenai cara merespons kritik, isu sensitif, konflik, dan komunikasi melalui media sosial. Pedoman tersebut tidak harus membatasi karakter personal pemimpin, tetapi dapat menjadi standar agar komunikasi tetap berada dalam koridor etika. Evaluasi terhadap komunikasi yang telah dilakukan juga dapat menjadi bagian dari proses perbaikan.

Akuntabilitas komunikasi juga menuntut adanya tindak lanjut setelah pesan disampaikan. Jika informasi yang diumumkan tidak tepat, pejabat atau institusi perlu menyediakan klarifikasi yang mudah diakses, menjelaskan bagian yang dikoreksi, dan menyampaikan pembaruan secara terbuka. Ketika kritik disampaikan masyarakat, respons sebaiknya menunjukkan apakah kritik telah diterima, ditelaah, atau ditindaklanjuti. Dengan demikian, akuntabilitas tidak berhenti pada pemilihan kata yang santun, tetapi mencakup tanggung jawab atas isi pesan dan tindak lanjut komunikasinya.

Dengan demikian, *linguistic self-restraint* merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin terhadap dampak komunikasi di ruang publik dan digital. Pemimpin tetap dapat berbicara secara terbuka dan tegas, tetapi memiliki kesadaran untuk mempertimbangkan konsekuensi setiap tuturan. Pembiasaan tersebut penting agar komunikasi pemimpin tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan, tetapi juga dapat menjadi contoh penggunaan bahasa yang bertanggung jawab bagi masyarakat.

c. Pembiasaan Komunikasi Empatis dan Inklusif (*Empathetic Leadership Communication*)

Strategi berikutnya adalah membangun komunikasi yang empatik dan inklusif. Empati dalam komunikasi kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengakui keresahan, kebutuhan, serta sudut pandang masyarakat sebelum memberikan respons. Pemimpin tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga perlu



menunjukkan bahwa masyarakat didengar dan dihargai sebagai bagian penting dalam kehidupan publik.

Komunikasi empatik tidak berarti pemimpin harus menyetujui seluruh kritik masyarakat. Pemimpin tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjelaskan perbedaan pandangan atau mempertahankan kebijakan tertentu. Namun, perbedaan tersebut dapat disampaikan dengan mengakui keberadaan persoalan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, respons pemimpin tidak terkesan mengabaikan pengalaman atau kekhawatiran masyarakat.

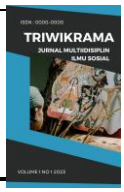
Penggunaan bahasa inklusif juga penting karena masyarakat memiliki latar belakang yang beragam. Pemimpin perlu menghindari pilihan bahasa yang menciptakan kesan memisahkan kelompok tertentu atau merendahkan pihak yang memiliki pandangan berbeda. Sebaliknya, penggunaan *solidarity markers* seperti “kita”, “bersama”, dan ungkapan yang menunjukkan kebersamaan dapat digunakan sesuai konteks untuk membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemimpin dan masyarakat.

Dalam menghadapi persoalan ekonomi, politik, maupun kebijakan publik, bahasa yang empatik dapat membantu menjaga kualitas komunikasi. Ketika masyarakat menyampaikan keresahan, pemimpin dapat terlebih dahulu mengakui persoalan tersebut, kemudian memberikan penjelasan mengenai kondisi, data, dan langkah yang dilakukan. Pola ini memungkinkan komunikasi berjalan secara lebih dialogis karena masyarakat tidak hanya menerima jawaban, tetapi juga memperoleh pengakuan terhadap persoalan yang mereka hadapi.

Komunikasi empatik juga penting dalam menghadapi perbedaan pendapat di media sosial. Ruang digital sering kali mempertemukan berbagai pandangan dalam waktu yang cepat sehingga konflik verbal dapat berkembang dengan mudah. Ketika pemimpin memberikan respons yang tenang dan tidak merendahkan pihak lain, hal tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan. Sebaliknya, bahasa yang agresif dapat memperkuat pola komunikasi yang sama di antara pengikut dan pengguna media sosial.

Keteladanan tersebut memiliki arti penting bagi generasi muda dan lingkungan pendidikan. Pemimpin yang menunjukkan kemampuan mendengarkan, menghargai kritik, dan menyampaikan perbedaan secara santun memberikan contoh bahwa kebebasan berpendapat dapat berjalan bersama dengan etika. Nilai tersebut dapat

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



diterapkan dalam lingkungan sekolah, perguruan tinggi, organisasi, maupun kehidupan bermasyarakat.

3. Perspektif Kebijakan Publik: Akuntabilitas Komunikasi Pemimpin

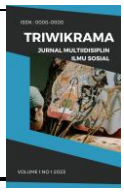
Dalam perspektif kebijakan publik, etika berbahasa pemimpin tidak dapat direduksi menjadi penggunaan diksi yang halus. Komunikasi pemerintahan merupakan bagian dari pertanggungjawaban kekuasaan karena melalui bahasa pemerintah menjelaskan persoalan, membenarkan pilihan kebijakan, dan merespons keberatan masyarakat. Komunikasi etis perlu mempertemukan kesantunan dengan ketepatan informasi, argumentasi berbasis bukti, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan melakukan koreksi. Ketegasan tanpa penghormatan dapat berubah menjadi intimidasi simbolik, sedangkan kesantunan tanpa kejujuran substantif dapat menjadi retorika yang menutupi persoalan kebijakan.

Uji akuntabilitas komunikasi dapat dilakukan melalui empat pertanyaan pokok: apakah informasi yang disampaikan benar dan dapat diperiksa; apakah respons menjawab substansi persoalan; apakah bahasa menghormati martabat pihak lain; serta apakah pejabat bersedia mengklarifikasi atau mengoreksi pernyataan yang keliru. Dengan ukuran tersebut, komunikasi tidak dinilai hanya dari kesan sopan, tetapi juga dari kualitas informasi dan tanggung jawab tindak lanjutnya.

a. Model Operasional Akuntabilitas Komunikasi Publik

Etika berbahasa pemimpin memiliki arti penting dalam komunikasi publik karena tuturan pejabat dapat menjadi referensi sosial yang memperoleh perhatian luas, terutama melalui media digital. Analisis sosiopragmatik menunjukkan bahwa penilaian kesantunan tidak cukup didasarkan pada pilihan kata secara terpisah, tetapi perlu mempertimbangkan konteks, tujuan komunikasi, relasi kekuasaan, tindak tutur, dan posisi pihak yang menjadi sasaran. Ketegasan dapat berjalan bersama dengan penghormatan apabila kritik diarahkan pada substansi, didukung bukti, dan tidak merendahkan martabat manusia.

Penyebaran digital memperluas kemungkinan suatu tuturan dikutip, ditafsirkan ulang, dikritik, disatirkan, atau direproduksi dalam konteks berbeda. Namun, amplifikasi komunikasi tidak dengan sendirinya membuktikan penerimaan sosial, peniruan perilaku, desensitisasi moral, atau perubahan norma komunikasi. Hubungan tersebut memerlukan korpus tuturan terverifikasi dan data respons khalayak.



Kontribusi kajian ini terletak pada sintesis konseptual yang menghubungkan otoritas komunikatif pemimpin, praktik kesantunan, dinamika pemaknaan digital, dan akuntabilitas komunikasi publik.

Penguatan etika komunikasi kepemimpinan perlu diarahkan pada keseimbangan antara ketegasan, penghormatan martabat manusia, ketepatan informasi, argumentasi berbasis bukti, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan melakukan koreksi. Pedoman komunikasi publik dapat memuat pemeriksaan fakta dan konteks, pengendalian diri berbahasa, mekanisme klarifikasi dan koreksi, serta evaluasi atas kualitas dialog dan pemahaman publik. Penelitian selanjutnya perlu menyusun korpus tuturan dengan kriteria dan periode yang jelas, memverifikasi sumber primer, serta mengumpulkan data respons khalayak untuk menguji hubungan antara keteladanan bahasa, persepsi, dan perilaku komunikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

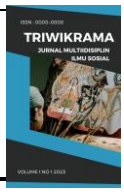
Kesimpulan

Rekomendasi berikut merupakan implikasi konseptual dari kajian, bukan hasil pengujian efektivitas program:

Penyebaran digital memperluas kemungkinan suatu tuturan dikutip, ditafsirkan ulang, dikritik, atau direproduksi dalam konteks berbeda. Namun, amplifikasi komunikasi tidak dengan sendirinya membuktikan penerimaan sosial, peniruan perilaku, atau desensitisasi moral. Hubungan tersebut memerlukan pengujian empiris melalui data tuturan dan respons khalayak. Kontribusi kajian ini terletak pada penjelasan konseptual mengenai hubungan antara otoritas komunikatif pemimpin, praktik kesantunan, dan dinamika pemaknaan publik.

Penguatan etika komunikasi kepemimpinan perlu diarahkan pada keseimbangan antara ketegasan, penghormatan terhadap martabat manusia, ketepatan informasi, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan melakukan koreksi. Pedoman komunikasi publik perlu memuat standar penyampaian informasi, mekanisme klarifikasi dan koreksi, serta evaluasi atas respons masyarakat. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan korpus tuturan yang terverifikasi dan data respons khalayak untuk menguji kaitan antara keteladanan bahasa, persepsi, dan perilaku komunikasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis yang disarankan meliputi:

- Bagi pimpinan negara dan pejabat publik: menerapkan pengendalian diri berbahasa (linguistic self-restraint), menghindari serangan personal ketika merespons kritik, menyampaikan informasi secara akurat, serta bersedia memberikan klarifikasi dan koreksi apabila terdapat kekeliruan.
- Bagi praktisi dan tim komunikasi pemerintah: menyusun pedoman komunikasi publik yang memuat standar kesantunan, verifikasi informasi, keterbukaan konteks, prosedur klarifikasi, koreksi informasi, dan evaluasi komunikasi. Pedoman perlu menjadi instrumen peningkatan akuntabilitas, bukan alat untuk membatasi kritik yang sah.
- Bagi masyarakat dan generasi muda: mengembangkan literasi digital dan kesadaran kritis dalam menilai tuturan figur publik. Setiap tuturan perlu dipahami dengan memperhatikan konteks dan sumbernya, serta tidak dijadikan pembenaran untuk melakukan penghinaan atau agresi verbal dalam interaksi sehari-hari maupun lingkungan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal Akademik

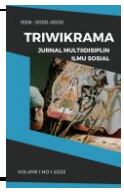
Astuti, H. T., Putri, M. A., & Nurlisa, N. (2026). Pengaruh media sosial terhadap keterampilan berbahasa Indonesia pada Gen Z. *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan*, *3*(4), 615-624.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice Hall.

Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.

Dalimunthe, A. R., Rubino, R., & Ritonga, H. J. (2026). Etika Komunikasi Islam dalam Praktik Kepemimpinan Kolaboratif Bobby Nasution di Sumatera Utara. *Jurnal Ragam Pengabdian*, *3*(2), 7188-7206.

Deso, V. E., Roslinda, M., Martika, M., Hasan, R. N., Fernanda, S. A., & Bardi, Y. (2026). Bahasa Indonesia sebagai Pilar Identitas Akademik: Revitalisasi Sikap dan Etika Berbahasa Mahasiswa di Era Digital. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan dan bahasa*, *3*(1), 11-25.



Fatmawati, L., & Ningsih, S. R. (2026). Kesantunan berbahasa dan pembentukan karakter siswa SMA: Studi sosiopragmatik di ruang digital. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 18(2), 112–126.

Gusni, G. (2026). Etika Berbahasa dalam Perspektif Gender: Membangun Komunikasi Inklusif Menuju Peradaban Society 5.0: Language Ethics in a Gender Perspective: Building Inclusive Communication Towards a Civilization Society 5.0. *ASCIDIA: As' adiyah Multidisciplinary Proceedings*, *1*(3), 152-158.

Hermandra, H., Elmustian, E., & Kanisya, D. A. (2026). KEPRIBADIAN PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF ADAT MELAYU RIAU: KAJIAN NILAI DAN ETIKA KEPEMIMPINAN. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, *3*(2), 1285-1294.

Leech, G. N. (2014). *The pragmatics of politeness*. Oxford University Press.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. rev.). PT Remaja Rosdakarya.

Muliani, E., Yunistita, Y., Barus, M. D. A., & Keloko, V. P. B. S. (2026). Sosialisasi Etika Berbahasa dan Kesadaran Sosial Bagi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *4*(4), 1438-1444.

Ningsih, R. (2026). Bahasa, Etika, dan Generasi Muda: Kajian Sosiopragmatik Kesantunan Berbahasa di Kalangan Siswa SMA. *J-LELC: Journal of Language Education, Linguistics, and Culture*, *6*(1), 83-95.

Partono, P., & Susanti, S. (2026). Dampak Norma Sebaya pada Etika Bahasa: Systematic Literature Review. *Journal of Literature Review*, *2*(1), 118-126.

Riswanda, & Risnawati. (2025). Bukan sekadar bagan: Struktur organisasi dan dinamika kinerjanya. CV Sintesia.

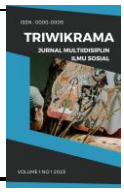
Riswanda. (2024). Menafsirkan paradigma penelitian kebijakan publik (Edisi revisi). CV Sintesia.

Riswanda. (2024). Nalar kebijakan: Bernalar kritis dalam sebuah dialektika (Edisi revisi). CV Sintesia.

Riswanda. (2026). Catatan kebijakan: Sebuah ikhtiar memahami negara. Serangkaian Riset Populer.

Riswanda. (2026). Skenario kebijakan resilien terhadap ancaman narkotika: Integrasi intelijen, komunitas, dan reformasi organisasi. CV Sintesia.

Wijana, I. D. P. (2021). *Pragmatik: Teori dan analisis*. Penerbit Andi.



Sumber Berita dan Publikasi Digital (Internet)

ANTARA News. (2026, 17 Juli). *Presiden Prabowo tekankan optimisme nasional dalam peringatan Hari Koperasi*. Antaranews.com. [suspicious link removed]

CNBC Indonesia. (2023, 17 Desember). *Penjelasan TKN soal ucapan "Ndasmu Etik" Prabowo di internal Gerindra*. Cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com

Kumparan. (2025, 12 Februari). *Sorotan atas komunikasi publik pejabat dalam merespons tagar #KaburAjaDulu warganet*. Kumparan.com. https://kumparan.com

UMS News. (2025, 15 Februari). *Pakar komunikasi UMS kritiki gaya komunikasi pejabat publik yang ala kadarnya dan minim empati*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://news.ums.ac.id

VOA Indonesia. (2024, 8 Januari). *Etika dan dinamika komunikasi politik elite dalam Debat Capres 2024*. Voaindonesia.com. https://www.voaindonesia.com